

**PEMECATAN LEGISLATIF TERPILIH DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH DPD
PARTAI PDI PERJUANGAN**



Optimization Software:
www.balesio.com

**PEMECATAN LEGISLATIF TERPILIH DPRD PROVINSI SULAWESI
SELATAN OLEH DPD PARTAI PDI PERJUANGAN**



TESIS

Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister
pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

ANRIANI

P4300216302

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2020



TESIS

**PEMECATAN LEGISLATIF TERPILIH DPRD PROVINSI SULAWESI
SELATAN OLEH DPD PARTAI PDI PERJUANGAN**

Disusun dan diajukan oleh

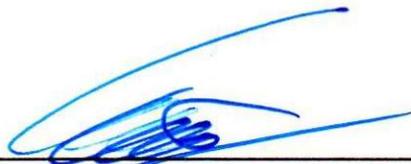
ANRIANI

Nomor Pokok : P4300216302

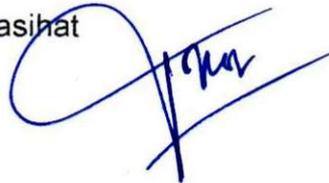
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **11 Agustus 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
Ketua



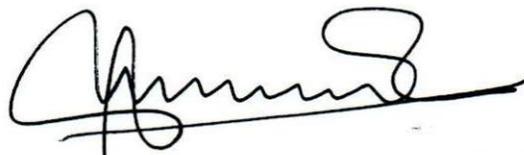
Dr. Gustiana A. Kambo, S. IP., M.Si.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.



ABSTRAK

ANRIANI. *Pemecatan Calon Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan (dibimbing oleh Muhammad dan Gustiana A. Kambo).*

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis faktor yang memengaruhi pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif yang memberikan gambaran faktual mengenai faktor pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor yang memengaruhi pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan. Pemecatan yang dilakukan DPD partai berawal pada adanya laporan dari sekretariat daerah terkait adanya pelanggaran anggaran dasar rumah tangga (ADRT) partai yang dilakukan oleh Novianus Y.L. Patanduk dengan tidak membayar uang gotong royong (uang saksi) yang dipersyaratkan partai. Selain itu, adanya tuduhan permainan suara yang dituduhkan oleh Risfayanti Muis yang berakibat merugikan perolehan suara di internal partai PDI Perjuangan. Pemecatan Novianus menjadi peluang Risfayanti Muis untuk terpilih menjadi anggota legislatif karena mendapatkan suara tertinggi kedua dari total perolehan kursi PDI Perjuangan.

Kata kunci: pemecatan, partai politik, uang saksi

20/7 2020 20/7 2020



ABSTRACT

ANRIANI. *The Dismissal of Elected Legislative Candidate of the DPRD of South Sulawesi Province by Regional Board of Indonesian Democratic Perjuangan Party (PDIP)* (supervised by **Muhammad** and **Gustiana A. Kambo**)

The aim of this study is to examine and analyze the factors affecting the dismissal of the elected legislative candidates of the DPRD of South Sulawesi Province by Regional Board of Indonesian Democratic Perjuangan Party (PDIP).

This research was a qualitative study providing a factual description of the factors affecting the dismissal of the elected legislative candidates of DPRD of South Sulawesi Province by Regional Board of PDIP.

The results of the research indicate that main factor of affecting the dismissal of the elected legislative candidate, Novianus YL Patanduk of DPRD of South Sulawesi Province is because of not paying mutual assistance money (witness money) required by the party. Besides, there are allegations of vote gained by Risfayanti Muis of PDIP which results in detrimental to the vote gained in PDIP internal party. The dismissal of Novianus gives an opportunity to Risfayanti Muis to be elected as a legislative member because he gets the second highest vote of the total seats won by the PDIP.

Key words: dismissal, political party, witness money



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “ Pemecatan Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan Pemilu 2019 akhirnya terselesaikan dengan baik.

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bpk Prof.Dr.Muhammad,.SIP,.M.Si sebagai Pembimbing I, dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, SIP,.M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan segala ketulusan dan keihlasan dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini serta atas Ilmu yang di berikan selama masa studi pada Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis pun menyadari sebenarnya tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan, motivasi semangat dan do'a dari beberapa pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Armin,M.Si, Ibu Dr. Ariana, S.IP,.M.Si, Bapak Drs.H.A.Yakub, Ph.D selaku penguji yang telah memberikan masukan masukan yang sangat berguna sehingga makin memperkaya analisis

ini.

Bapak almarhum Prof.Dr. Kausar Bailusy,MA sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Prof.Dr. Andi Gau Kadir,M.Si selaku penguji



yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dan memperkaya ilmu penulis.

3. Lembaga tercinta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.
4. Bapak Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Program Studi Ilmu politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan selama masa studi.
5. Bapak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Arif Budiman, S.S.,SIP,.MBA, dan Bapak Hasyim Asyari,SH.,M.Si.,Ph.D
6. Ibu DR. Sri Nuryanti, S.IP,.MA yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
7. Bapak dan Ibu Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas perkenan waktu wawancara dan diskusi serta rekan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yakni Ibu Julita Rahayu Kasubag Hukum dan Bapak Muhammad Asri Kasubag Tekhnis dan rekan staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Ibu tercinta Hajja Sarintang, almarhum Ayahanda Muhammad Aminuddin, dan Adik adikku yang tercinta Amrin, Asma, Ariyanti,Anita dan Ahyuni yang selalu memberi semangat yang tidak pernah berhenti.
9. Suamiku tercinta Faisal Amir SE,.MM, Putri dan Putra tercintaku Nur

haratun Nisa Auliyah, Nur Syahrul Badiullah, dan Nur Darul Aslam
an yang tiada henti menyemangati.



10. Saudara saudariku seperjuangan di Netfid Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Mardiana Rusli, Uki, Sitti Hamidah, Upi untuk selalu memotivasi mendukung dan berjuang untuk terus belajar.
11. Terima kasih atas kebersamaannya teman Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Politik Tata kelola Pemilu dan Politik Local Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sahabatku Andi Anisa, Mega, Wijaya, Asfira, Afif, Mulawarman, Annisa Nurdiasa, Wulan, Zulfikar dan Kafrawi serta yang lain yang memberikan kesempatan untuk bersilatullahim semoga menjadi berkah bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Sekian

Makassar, Agustus 2020

Anriani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pendekatan Kelembagaan Baru (<i>New Institutionalism</i>)	11
2.2 Pemahaman tentang partai politik dan fungsinya).....	18
2.2.1 Fungsi Partai Politik	22
2.2.2 Pelembagaan Partai Politik	26
2.3 Teori Pilihan Rasional	30
2.4 Penelitian Yang Relevan	36
2.5 Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
Jenis Penelitian	43
Tehnik Pengumpulan Data	45



3.3 Tehnik Menentukan informan	48
3.4 Sumber Data	49
3.5 Lokasi Penelitian	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	52
4.1 Sejarah Partai PDI Perjuangan	52
4.2 Visi Partai PDI Perjuangan	57
4.3 Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024.....	64
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	78
5.1 Faktor Pemecatan Calon Legislatif terpilih DPRD hasil Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan....	73
5.1.1 Partisipasi Dana Gotong Royong	74
5.1.2 Pelanggaran dalam Penetapan Jumlah Suara	87
5.1.3 Pola Komunikasi.....	96
5.2 Implikasi Teori	99
BAB VI PENUTUP	105
6.1 Kesimpulan	105
6.1 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	10



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024.....65

Tabel 1.2

Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2014- 2019.....67

Tabel 1.3

Perolehan Kursi DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014.....68

Tabel 1.4

Daftar Ketua DPRD Sulawesi Selatan.....70

Tabel 1.5

Perolehan Kursi Partai Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan.....88

Tabel 1.6

Perolehan Suara Partai Dan Caleg Terpilih Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan.....89

Tabel 1.7

Hasil Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan Pada Pemilihan anggota Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Sulsel.....93



Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Pikir.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi karena menjadikan partai politik sebagai institusi terpenting dan strategis serta menjadi pilar bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilihan umum (pemilu).

Partai politik di Indonesia merupakan bagian dari kehidupan politik masyarakat, terutama kita mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah Indonesia. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).¹

Pemahaman umum tentang partai politik adalah sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideology tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Kebijakan umum partai tersebut merupakan asil pemaduan berbagai kepentingan yang idup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan



¹ Sudiardjo. 2013. Dasar-dasar ilmu politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal.

kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan umum itu adalah lewat pemilihan umum.²

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2019, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan dua belas kali pemilihan umum. Yang menarik dari pemilihan umum di Indonesia adalah yang terjadi di tahun 2019, dimana dalam pemilu 2019, pemilihan legislative dan Presiden dilakukan secara serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XII/2013. Dan ini merupakan peristiwa demokrasi yang monumental karena baru pertama kali di gelar dalam perhelatan pemilu sepanjang sejarah kepemiluan Indonesia.

Pemilihan legislatif khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 11 daerah pemilihan (dapil) dengan sebaran kursi yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Sulawesi selatan memiliki alokasi kursi 85 anggota legislatif dengan sebaran kursi yaitu: daerah pemilihan (dapil) I 11 kursi, : daerah pemilihan (dapil) II 6 kursi, daerah pemilihan (dapil) III 9 kursi, daerah pemilihan (dapil) IV 7 kursi, daerah pemilihan (dapil) V 6 kursi, daerah pemilihan (dapil) VII 7 kursi, daerah pemilihan (dapil) VIII 7 kursi, daerah pemilihan (dapil) IX 9 kursi, daerah pemilihan (dapil) X 9 kursi dan daerah pemilihan (dapil) XI 11 kursi. Tiap partai politik melakukan sistem rekrutmen untuk menempatkan kader terbaiknya ditiap daerah pemilihan, PDI Perjuangan sebagai salah satu peserta pemilu mengikuti segala



² Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. PRENADAMEDIA. Jakarta. Al. 277-278

rangkaian pemilu termasuk mendaftarkan, dan pembekalan calon legislatif untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik.

Partai PDI Perjuangan berhasil meraih total 8 kursi dari 11 daerah pemilihan (dapil) di Sulawesi Selatan yaitu: daerah pemilihan (dapil) 1, daerah pemilihan (dapil) II, daerah pemilihan (dapil) V, daerah pemilihan (dapil) VI, daerah pemilihan (dapil) VII, daerah pemilihan (dapil) VIII, daerah pemilihan (dapil) IX, daerah pemilihan (dapil) X, daerah pemilihan (dapil) XI, dari ke 8 perolehan kursi salah satu daerah pemilihan (dapil) terjadi sengketa antara internal partai yaitu daerah pemilihan (dapil) II.

Proses pemecatan terjadi salah satu calon anggota legislative terpilih di daerah pemilihan (dapil) II Sulawesi selatan, meski sudah mengikuti segala rangkaian tahapan telah dilewati partai PDI Perjuangan mulai dari pencalonan, sampai pada tahap penetapan kader terpilih, partai PDI Perjuangan mencalonkan kadernya untuk ikut pemilu ke Komisi pemilihan Umum (KPU), dan proses di KPU berdasarkan tahapan dari daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap sehingga ditetapkan oleh KPU melalui sidang pleno bahwa calon yang diusung oleh partai PDI-Perjuangan untuk anggota legislative DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersyarat ikut dalam pemilu.

Setelah proses yang dilalui tersebut, terjadi pemecatan yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan terhadap calon legislatifnya sendiri

terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan di tingkat Sulawesi selatan di wilayah dapil 2 yang meliputi wilayah Makassar



B: Panakkukang, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea. Calon yang merupakan kandidat dari partai PDI Perjuangan di pecat oleh partai PDI Perjuangan sendiri berdasarkan putusan dewan mahkamah partai PDI Perjuangan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemecatan novianus YL Patanduk sebagai kader PDIP bukan tanpa alasan, secara dadakan dan tanpa bukti-bukti kuat, semua melalui proses panjang, melalui mekanisme partai, melalui proses di dewan kehormatan sebelum surat pemecatannya keluar. Novianus selain tidak membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS) pada pileg 2019 lalu, juga melakukan gerakan tambahan lain yang dapat merugikan serta merusak nama baik partai.³

Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga (Adrt) partai PDI Perjuangan melakukan pemecatan terhadap Novianus YL Patanduk karena baru melakukan pembayaran dana gotong royong atau saksi setelah proses pemilihan, namun saat itu ditolak dengan alasan sudah terlambat. Karena minimnya dana (kurangnya modal) dan juga focus novianus saat itu adalah untuk bagaimana memperoleh suara. Dana gotong royong yang harus dibayar, senilai 20 juta. Terkait pemecatannya, novianus mengatakan belum berencana melakukan perlawanan atau mengambil jalur hukum, dia memilih mengambil langkah persuasive dan berharap pengurus partai kembali mempertimbangkan SK pemberhentian tersebut.



[akassar.tribunnews.com/2019/09/22/dipecat-pdip-novianus-patanduk-tetap-ikut-tikan-anggota-dprd-sulsel](https://www.tribunnews.com/2019/09/22/dipecat-pdip-novianus-patanduk-tetap-ikut-tikan-anggota-dprd-sulsel)

Pemecatan yang terjadi dalam internal partai PDIP adanya permasalahan internal partai terkait kepentingan dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang diambil tersebut, mengingat Hasil pemilu serentak tahun 2019 calon legislative DPRD provinsi daerah pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan dari PDI-Perjuangan dimenangkan oleh Novianto Y.L Patanduk, S.E dan dinyatakan oleh KPU menjadi calon terpilih dengan perolehan suara 4.305. Permasalahan yang muncul kemudian adalah terjadi pemecatan calon terpilih anggota legislatif DPRD provinsi Sulsel di dapil II makassar B oleh partai PDIP setelah ditetapkan berdasarkan perolehan suara oleh KPU.

Pemberhentian keanggotaan Novianus oleh DPD Partai PDIP, maka digantikan oleh Risfayanti, sebagai calon legislative dengan perolehan suara terbanyak kedua setelah Novianus. Pergantian ini juga mengisyaratkan dan memperkuat adanya permasalahan terkait kepentingan dalam internal partai dengan melakukan *bargaining position*.

Terpilihnya Risfayanti sebagai kader terpilih karena secara rasional partai melihat bahwa risfayanti adalah kader partai PDIP yang juga LO sedangkan Novianus jika berpacu dalam aturan ideal partai, belum dapat dikatakan sebagai kader partai karena belum mencukupi masa keanggotaannya selama 5 tahun (belum memenuhi syarat menjadi kader partai).

PD Partai Politik mengajukan Risfayanti Muin menggantikan s selain secara perolehan suara terbanyak kedua serta dinilai



mampu menjalankan kepentingan partai yang disepakati bersama dalam internal partai PDIP. Pergantian yang terjadi antara Novianus dan Risfayanti juga mengundang pertanyaan baru mengenai pelembagaan partai politik. Agar sebuah kepartaian mampu menopang secara kokoh jalannya demokrasi dan stabilitas politik, pelembagaan kepartaian menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan. Pelembagaan kepartaian akan menjadikan partai bekerja dalam koridor fungsi-fungsi yang semestinya. Dalam literature kepartaian dikenal dua pemikiran tentang pelembagaan, yaitu pelembagaan sistem kepartaian dan pelembagaan partai politik. Dalam kasus ini termasuk dalam pelembagaan partai politik yaitu merujuk pada proses dimana partai politik tertentu mendapatkan nilai baku dan stabil. Dimensi pelembagaan partai politik diantaranya derajat kesisteman, otonomi keputusan, reifikasi, dan penanaman nilai dalam masyarakat.⁴

Aturan yang menjadi ketetapan partai PDI Perjuangan yang dilanggar oleh Novianus YL Patanduk sehingga mengeluarkan otonomi keputusan yaitu pemecatan. Alasan terjadinya pemecatan calon legislative terpilih tersebut disebabkan oleh pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Novianus yakni tidak membayar uang Gotong Royong. Sesuai dengan peraturan KPU terkait penggantian calon DPR terpilih, diganti oleh calon dengan perolehan suara terbanyak kedua, dalam hal ini risfayanti maju menggantikan posisi novianus berdasarkan perolehan suara yang



ungkas. 2011. Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia. Institute for Democracy and Yogyakarta. Hal. 62

ditetapkan oleh KPU setelah terjadinya pemecatan novianus oleh DPW PDI Perjuangan provinsi Sulawesi Selatan.

Pilihan rasional partai PDI Perjuangan dari pergantian calon terpilih, peralihan dari Novianus YL Patanduk kepada Risfayanti adalah, secara individual Risfayanti memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam partai PDI Perjuangan, mengingat Risfayanti adalah kader PDI P yang menjabat sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan sebagai sekretaris internal dan ketua badan saksi partai nasional (BSPN) Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai LO, sedangkan Novianus belum mencapai masa keanggotaan 5 tahun dalam partai PDI Perjuangan, sehingga naiknya Risfayanti sebagai calon terpilih DPRD provinsi Sulsel dapat mengisi kursi DPRD Dapil II Makassar B dari Partai PDI Perjuangan, namun disisi lain, secara kuantitas (jumlah) suara, Risfayanti kalah saing dengan Novianus, karena keunggulan novianus berada diperolehan pertama berdasarkan surat keputusan KPU provinsi Sulsel no. 158/pl.01.9.kot/73/provVIII2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum DPRD provinsi sulawesi selatan dengan perolehan suara 4.305. dengan kata lain pemecatan novianus dan majunya risfayanti sebagai calon terpilih anggota legislative terpilih DPRD sulsel setelah menggantikan novianus di sinyalir sebagai tindakan atau pilihan rasional partai PDIP dengan mempertimbangan keuntungan dan kerugian dari masing-masing calon.



Pemecatan calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh partai PDIPerjuangan menjadi salah satu bukti eksistensi partai poltik.

Dalam hal ini partai PDIPerjuangan menunjukkan kekuatan partai dalam keputusan pemecatan kandidatnya yang telah memenangkan suara terbanyak ditempat pemilihan (Dapil II wilayah Makassar B). Makna "kekuasaan" dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi anomali yang akan terus mengikis demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan mengkaji mengenai faktor-faktor pemecatan calon anggota legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi selatan dari partai PDI Perjuangan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Fenomena yang terjadi dalam penjelasan dilatarbelakang di atas, mengisyaratkan bahwa adanya nilai-nilai baku, aturan dan norma yang ditetapkan oleh partai serta merta harus selaras dengan visi misi kader yang membawa kepentingan partai itu sendiri. Secara sah partai memiliki otonomi kekuasaan dalam mengambil keputusan, hal ini juga bagian dari pelembagaan partai politik, dengan begitu membuat posisi partai semakin kuat, namun dengan permasalahan (kasus) pemecatan yang terjadi di Sulawesi selatan terhadap calon legislative terpilih Novianus juga perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai dinamika partai politik dalam penetapan calon terpilih, serta alasan terjadinya pemecatan calon legislative terpilih DPRD provinsi sulawesi selatan pemilu serentak tahun 2019 oleh PDIP.

Rumusan masalah penelitian yaitu: Mengapa DPD partai PDI



Perjuangan melakukan pemecatan terhadap calon anggota legislatif terpilih Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini yaitu: Mengetahui dan menganalisa alasan terjadinya pemecatan calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh DPD PDI Perjuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

- a. Memperkaya kajian ilmiah terhadap dinamika partai politik, dengan melihat dari sudut pandang sistem kelembagaan partai politik dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini keputusan partai PDI Perjuangan dalam pemecatan calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan pemilu serentak tahun 2019.
- b. Memperkaya kajian ilmiah terhadap analisa teori pertukaran dengan pertimbangan *bargaining position* terkait keuntungan dan kerugian yang di dapatkan oleh kedua belah pihak dalam permasalahan pemecatan tersebut.

Manfaat Praktis

- a. Bahan rujukan bagi masyarakat khususnya akademisi, mahasiswa maupun para peneliti yang memiliki ketertarikan pada ilmu politik dan tata kelola pemilu khususnya pada dinamika yang terjadi didalam

nal partai politik. Dalam hal ini terkait proses dan alasan pemecatan



calon legislative terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh DPD partai PDI Perjuangan.

- b. Menambah literasi masyarakat terhadap fungsi peran partai dalam mengambil keputusan, dalam hal ini keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari pemecatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*)

Berbeda dengan *old institutionalism*, bahwa *new institutionalism* lebih mencermati bukan hanya sekedar dampak institusi terhadap individu, akan tetapi juga bagaimana interaksi antara individu dengan institusi. Pendekatan Institusional baru lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya. Metode ini memberikan perhatian bahwa institusi mengakibatkan perilaku politik individu.

Rod Rhodes: Pendekatan institusional adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal. Ia memakai

ahli hukum dan sejarawan untuk menjelaskan batas-batas pada politik maupun efektifitas demokratis, dan ia membantu



perkembangan model westmister tentang demokrasi representatif. Tahun 1980-an, perhatian terhadap lembaga formal dan non-formal pada sektor publik dan bagaimana peran penting struktur, mulai tumbuh kembali. Penjelasan kelembagaan digunakan dalam studi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperhatikan perilaku pada tingkat individu.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, disamping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris. Sebagai contoh : “institusionalisme lama” sistem presidensial secara signifikan berbeda dengan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja pemerintah?. Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan insitusionalisme baru juga melihat bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.

Akar ilmu politik adalah pada studi-studi tentang lembaga, tentang lembaga negara, birokrasi, kebijakan publik, yang kesemuanya dilihat dalam kerangka kelembagaan. Tetapi pada periode pasca Perang Dunia II,



disiplin ilmu politik, terutama di Amerika Serikat, telah mengkritik studi tentang lembaga-lembaga tersebut dengan berkembangnya dua pendekatan yang lebih didasarkan pada asumsi individualistik : behavioralisme dan pilihan rasional. Kedua pendekatan ini mengasumsikan bahwa individu bertindak secara otonom sebagai individu, baik berdasarkan karakteristik sosio psikologis atau perhitungan rasional untung rugi oleh individu. Dalam kedua teori, individu tidak dibatasi oleh baik lembaga formal maupun informal, tapi akan membuat pilihan mereka sendiri. Faktor individu dipandang lebih determinan dalam proses-proses berjalannya lembaga-lembaga negara, serta pada keputusan-keputusan politik⁵. Hal ini merupakan titik tolak dari perkembangan pendekatan “*new institutionalism*” atau pendekatan institusionalisme baru.

Hall dan Taylor⁶ membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism*), institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*) dan institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*). Institusionalisme historis berkembang sebagai respons terhadap teori-teori kelompok politik dan struktural-fungsionalisme yang menonjol dalam ilmu politik selama 1960-an dan 1970. Dari teori kelompok, institusionalis historis menerima anggapan bahwa konflik itu di antara kelompok yang saling bersaing untuk sumber daya yang langka. Mereka



G.2011. *Institutional Theory InPolitical Science: The NewInstitutionalism*. Bloomsbury USA.Hal.25
, & Taylor, R. C. 1996. *Political Science and TheThree New Institutionalisms*. Political (5), 936-957. Hal.9.

menemukan penjelasan seperti itu dalam organisasi kelembagaan pemerintahan dengan konflik struktur ekonomi untuk mengistimewakan beberapa kepentingan sambil melumpuhkan orang lain. Di sini, mereka dibangun di atas tradisi lama dalam ilmu politik yang menetapkan kepentingan formal lembaga-lembaga politik tetapi mereka mengembangkan konsepsi yang lebih luas dari keduanya akan pentingnya institusi.

Para institusionalis historis juga dipengaruhi oleh cara dimana fungsionalis struktural melihat pemerintahan sebagai sistem keseluruhan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Mereka menerima anggapan ini tetapi bereaksi melawan kecenderungan structural fungsionalis untuk melihat ciri-ciri sosial, psikologis atau budaya individu. Sebagai gantinya, mereka melihat organisasi kelembagaan politik atau ekonomi politik sebagai faktor utama menyusun perilaku kolektif dan menghasilkan hasil yang berbeda. Mereka menekankan 'strukturalisme' yang tersirat dalam lembaga-lembaga pemerintahan daripada 'fungsionalisme' dari pendekatan sebelumnya yang memandang hasil-hasil politik sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sistem.

Apa yang kita sebut institusionalisme sosiologis muncul dalam subbidang teori organisasi. Pergerakan ini kira-kira mendekati akhir tahun 1970-an, ketika beberapa sosiolog mulai menantang perbedaan yang

tradisional antara bagian-bagian dunia sosial yang dikatakan memiliki tujuan formal 'rasionalitas' dari jenis yang terkait dengan



bentuk-bentuk organisasi dan birokrasi modern dan bagian-bagian dari dunia sosial dengan menampilkan beragam praktik yang terkait dengan 'budaya'. Sejak Weber, banyak sosiolog telah melihat struktur birokrasi yang mendominasi *landscape modern*. Di bidang pemerintahan, perusahaan, sekolah, organisasi kepentingan dan sejenisnya, sebagai produk dari upaya intensif untuk menyusun struktur yang semakin efisien untuk melakukan tugas-tugas terkait dengan masyarakat modern.

Institusionalis baru dalam sosiologi mulai berargumen bahwa banyak bentuk dan prosedur institusional yang digunakan oleh organisasi modern tidak diadopsi hanya karena mereka paling efisien untuk tugas-tugas yang dikerjakan, sejalan dengan beberapa "rasionalitas transenden." Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa banyak dari bentuk dan prosedur ini harus dilihat sebagai praktik budaya tertentu, seperti mitos dan upacara yang dibuat oleh banyak masyarakat, dan berasimilasi ke dalam organisasi, tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi cara-formal mereka, tetapi sebagai hasil dari jenis proses yang terkait dengan transmisi praktik budaya lebih umum.

Perspektif ini, problematis yang biasanya diadopsi oleh institusionis sosiologis mencari penjelasan mengapa organisasi mengambil seperangkat bentuk, prosedur, atau simbol kelembagaan tertentu; dan menekankan bagaimana praktik tersebut disebarkan melalui bidang organisasi atau lintas negara. Mereka tertarik, misalnya, dalam

skan kesamaan yang mencolok dalam bentuk dan praktik
si yang ditampilkan oleh Kementerian Pendidikan di seluruh dunia,



terlepas dari perbedaan kondisi lokal, atau bahwa perusahaan menampilkan lintas sektor industri apa pun produk yang mereka produksi. Dobbin menggunakan pendekatan untuk menunjukkan bagaimana konsepsi negara dan pasar yang dibangun secara kultural mengkondisikan kebijakan perkeretaapian abad ke-19 di Prancis dan Amerika Serikat.

Institusionalisme pilihan rasional berawal dari studi tentang perilaku kongres di Amerika, dimana terdapat perbedaan yang beragam dan tajam terhadap preferensi dan karakteristik legislator mengenai kebijakan. Tetapi meski terjadi perbedaan yang tajam, kongres masih menunjukkan situasi yang cukup stabil. Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana institusi dengan perbedaan yang tajam masih dapat berjalan dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah adanya transaksi atau tawar-menawar di antara para legislator dalam perumusan atau kesepakatan terhadap kebijakan tersebut.

Terdapat proses-proses politik berdasarkan pertimbangan untung-rugi untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama⁷. Institusionalisme pilihan rasional melihat proses institusionalisasi dan relasi antar institusi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan bersama melalui pertimbangan-pertimbangan rasional dan untung-rugi. Dalam pandangan institusionalisme pilihan rasional—seperti halnya teori pilihan rasional-manusia secara individual—yang juga merupakan representasi dan sebuah

dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan



kepentingan rasional, didasari oleh perhitungan ekonomis, untung rugi, memaksimalkan keuntungan dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Asumsi mendasar dari institusionalisme pilihan rasional adalah bahwa individu adalah aktor sentral dalam proses politik, dan bahwa orang-orang bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Salah satu mencapai tujuan tersebut secara efektif adalah melalui tindakan institusional, dan perilaku mereka juga dibentuk oleh lembaga⁸ .

Tindakan individu mempengaruhi lembaga, tetapi juga diatur oleh aturan-aturan dalam lembaga. Karena itu, tindakan atau keputusan lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan individu. Institusionalisme pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan-baik formal maupun informal-yang disepakati bersama. Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah dimana aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan (biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi dan dengan demikian melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa memastikan hasil dari struktur yang terbentuk⁹ .



G. 2011. *Institutional Theory in Political Science: the new institutionalism*. Bloomsbury USA. Hal.45

A., & Foweraker, J. 2001. *Encyclopedia Of Democratic Thought*. Taylor & Francis. Hal

2.2 Pemahaman Tentang Partai Politik Dan Fungsinya

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati Nurani.¹⁰

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik

organisasi yang terstruktur baru muncul pada tahun 1830 sebagai

¹⁰ Muchamad. 2011. Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam Republik. Rajawali pers. Hal 4-5.



wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.¹¹ Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹²

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹³



on Samuel P. 2003. Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. Jakarta: raja
ersada. Hlm. 472

Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm.

n H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia. Jakarta: gratha ilmu. Hlm. 102

Menurut Edmund Burke, partai politik adalah kumpulan orang – orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka berdasarkan pada prinsip – prinsip tertentu yang mereka semua sepakati.¹⁴ Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.¹⁵

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga



urke. Richard S, Katz dan William Crotty, Handbook Partai Politik. Bandung : Nusa
4 hlm.4

t Muchamad. 2011. Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam
Republik. Rajawali pers. Hal 31

berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir. Mirriam budiardjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benarbenar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang hitrogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.¹⁶

Zarkasih Nur, mengatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Partai politik sebagai pilar sistem demokrasi berperan sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Daribeberapa fungsi partai politik yang di jelaskan di atas fungsi rekrutmen adalah fungsi yang paling mendasar dalam keikutsertaan pada setiap Pemilu ataupun



Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.

Pemilukada fungsi rekrutmen ini menjadi hal yang mendasar karna dari fungsi rekrutmen ini partai politik bisa mengusung hasil kader yang di anggap mampu untuk maju bersaing dalam Pemilu ataupun Pemilukada.

2.2.1 Fungsi Partai Politik

Untuk memahami peran partai politik, akan lebih mudah apabila memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo bahwa terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut:

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan¹⁷.

Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau platform partai untuk



an, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal 103-104

diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat¹⁸.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok¹⁹.

b. Sosialisasi Politik



Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta. Hal 406

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush dalam A. Rahman H.I., 2007 adalah sebagai berikut.

“political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena (Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik)”

Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan bersama²⁰.

an, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal 103-104



c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart dalam A. Rahman H.I., dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik²¹.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya Negara dmokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan

mengenai keputusan keputusan politik yang diambil pemerintah.



Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

2.2.2 Pelembagaan Partai Politik

secara umum. pelembagaan parpol dalam pengertian klasik Huntington adalah ketika organisasi langsung telah mendapatkan 'value (nilai) " dan stability (stabilitas). Jika parpol telah berhasil memformulasi menginternalisasikan nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode Waktu tertentu: terdapat stabilitas Internal, maka parpol dapat dikatakan terlembagakan dengan baik

Pelembagaan parpol dengan demikian bagi Guillermo O'Donnell melibatkan dua aspek penting, yaitu 'value infusion (nilai Pemasukan) dan " behavioral routinization (rutinitas perilaku). Yang pertama merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan besar kepentingan Individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar

parpol. Dari sini maka parpol akan dapat mengembangkan penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya parpol



rootedness). Sementara itu behavioral routinization terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil“, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan Normal tenanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada prediktabilitas dan regulasi perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus parpol, maupun masyarakat luas lainnya.‘ Hal ini tentu tidak mudah, karena selalu saja ada upaya-upaya pembajakan parpol oleh segelintir elit maupun oligarki parpol untuk kepentingan politik sempit mereka. Juga terkadang parpol tidak bisa mengelola rutinisasi perilaku ini karena terciptanya dysfunctional factionalism (dysfungsional faksionalisme) yang membuat parpol sulit untuk menjadi aktor politik yang solid dan lunggal akibat pertarungan faksi-faksi yang tajam

Vicky Randall dan Lats Svasand menyebutkan bahwa pelebagaan parpol melibatkan setidaknya empat variabel penting, yaitu: 'systemness (kesistemannya), decisional autonomy (putusan otonomi), value infusion (nilai pemasukan), dan reification. Systemness (kesisteman reifikasi). merujuk pada pengelolaan Infrastruktur parpol dan dinamika Internalnya: decisional autonomy, terkait dengan hubungan parpol dan lingkungan eksternalnya, khususnya menyangkut otonomi politik dan finansial, keterkaitannya dengan organisasi massa, dan kemampuan parpol untuk otonom dari permainan politik di tingkat nasional dan lokal; value infusion, mirip dengan pemahaman di atas, terkait dengan dimensi attitudinal (nilai-

slkap) pelebagaan parpol dimana nilai-nilai Ideologis yang dapat dan melekat pada para anggota atau pendukung menjadi perhatian



utama: dan terakhir, reincation terkait dengan kemampuan parpol untuk menanamkan suatu citra atau brand name (merek) tertentu di benak para pemilih.' Jika suatu parpol bisa mengelola keempat variabel tersebut dengan baik, maka dapat dikatakan parpol tersebut mengalami pelembagaan parpol yang optimal. dengan hasilnya tentu adanya stabilitas organisasi. Efektivitas peran dan posisi politiknya. menguatnya basis konstitusi dan penerimaan pemilih serta adanya dinamika internal yang mendorong solidaritas parpol

Pelembagaan partai politik juga sangat dipengaruhi oleh the nature of the party law (sifat dari peraturan partai). Sebagai lembaga demokrasi yang bentuk, operasi, dan eksistensinya diatur oleh UU, parpol seringkali tidak memiliki banyak pilihan atau mempunyai intensif sistemik untuk memperkuat pelembagaan operasionalnya. Pada umumnya, UU parpol suatu negara akan mengikuti apa yang oleh Kenneth Janda sebut sebagai pola 5P, yaitu 'to proscribe, permit, promote, protect, or prescribe.' (untuk mengharamkan, izin, mempromosikan, melindungi, atau menentukan). Secara arti luas, prescription model terkait dengan pelarangan atau pernyataan pelarangan suatu parpol karena aktifitas atau kebijakannya, termasuk di dalamnya adalah pencegahan parpol untuk melakukan tindakan atau aktivitas tertentu; permission model merujuk pada hal-hal dan batasan-batasan yang diizinkan untuk dilakukan parpol dalam

nya; promotion model berarti memajukan, mendorong, mendukung dan aktivitas parpol; protection model menyangkut pengamanan



terhadap parpol, baik dengan penentuannya sebagai aktor utama dalam politik atau terkait dengan pencegahan terhadap upaya-upaya yang dapat merugikan atau menimbulkan beban bagi parpol resmi; serta model terakhir yakni prescribe model terkait dengan perintah atau mewajibkan parpol untuk menuruti kebijakan politik negara tertentu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mendukung peran maupun fungsinya.

Suatu parpol yang hidup dalam UU yang didominasi dengan semangat atau aturan pelarangan (prescription model) tertentu akan mengalami banyak kendala maupun keterbatasan untuk melakukan berbagai inovasi dan improvisasi kelembagaan untuk merespon tantangan dan dinamika internal. Dalam model ini, parpol juga seolah-olah berada dalam posisi yang inferior terhadap pemerintah karena kuatnya peran pemerintah dalam pengaturan kehidupan parpol, termasuk di dalamnya pelarangan maupun pembatasan aktivitas. Model yang sekiranya mendukung pelembagaan parpol adalah yang memuat banyak unsur promotion dan protection karena dengan demikian parpol didorong, difasilitasi, dan dijamin eksistensinya untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya. Dalam banyak hal, parpol sangat membutuhkan perlindungan dari negara. SUDaya eksistensi parpol sebagai lembaga demokrasi tidak dibajak oleh segelintir elit atau pemimpinnya untuk kepentingan politik sempit yang transaksional

pragmatis lainnya dan mengorbankan kepentingan anggota dan parpolnya



2.4 Teori Pilihan Rasional

Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing.

Rasionalitas muncul ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan

tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi

Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai

rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih



tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.

Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki

kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor. Coleman juga menjelaskan mengenai interaksi antara aktor dengan sumber daya ke tingkat sistem sosial. Basis minima untuk sistem sosial adalah tindakan dua orang aktor, dimana setiap aktor

dikendalikan sumber daya yang menarik perhatian bagi pihak lain. Aktor mempunyai tujuan, dan masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan wujud dari kepentingannya yang memberikan ciri saling



tergantung pada tindakan aktor tersebut. Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional. Tetapi dalam hal ini akan sama saja apakah seorang aktor dapat bertindak dengan tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan ataupun menyimpang dari cara-cara yang diamati.

Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro, ataupun bagaimana cara hubungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual disini adalah lembaga sosial.

Teori ini lebih menekankan aktor yang disini diartikan sebagai individu yang melakukan sebuah tindakan. Tindakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sebuah perubahan sosial. Ketika para petani memilih suatu pilihan untuk bertahan dalam kondisi yang susah, terlebih lagi pada musim paceklik. Strategi bertahan hidup petani miskin merupakan sebuah

yang didalamnya memiliki sebuah tindakan yang dilakukan oleh dan dianggap rasional. Dan tindakan tersebut dapat membuat



perubahan pada hidupnya, yaitu merubah cara untuk mempertahankan hidupnya di musim yang sangat tidak menguntungkan itu.

Aktor memegang peranan yang sentral untuk melakukan sebuah tindakan. Setiap pilihan yang dipilih dalam memutuskan pemecatan terhadap kader partainya dengan alasan tidak tunduknya terhadap aturan partai, Tindakan yang dipilih dengan memilih kader lain yang menggantikan suatu jabatan politik dianggap rasional karena akan dianggap lebih memberikan keuntungan di internal partai. Teori pilihan rasional ini menekankan bahwa aktor menjadi kunci terpenting di dalam melakukan sebuah tindakan. Aktor disini bisa dikatakan sebagai individu atau Negara yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai kepentingannya dan berusaha memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan cara mengambil atau memilih suatu pilihan yang dianggap membawa hasil untuk mencapai kepentingannya tersebut. Sebagai contoh, jika pilihan 1 dianggap lebih penting dan lebih bermakna dari pada pilihan 2, dan 3, maka aktor akan memilih pilihan 1.

Posisi Aktor sebagai individu yang melakukan sebuah tindakan. Aktor tersebut dapat mengatur dirinya sendiri, karena aktor tahu apa yang ia mau dan yang harus dilakukan. Teori pilihan rasional merupakan alat untuk berpikir logis, berfikir rasional, didalam membuat suatu keputusan.

alnya dengan para petani miskin yang memilih suatu pilihan yang paling rasional (sesuai dengan akal) dibandingkan dengan pilihan lainnya untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya dan



menyambung kehidupannya. Strategi atau cara yang diambil merupakan suatu hal yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya hingga pada akhirnya menjadi suatu keputusan yang dipandang sangat rasional.

Boudon mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “rasional” dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “utility maximizing approach” berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Konsep utility maximizing approach mungkin bisa dilihat kesamaannya dengan teori pilihan rasional dari eksperimen Neumann (1959) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan “seberapa banyak pemain harus bermain untuk mendapat keuntungan maksimal?”.

Konsep Teori Pilihan Rasional secara teoritik bisa sangat kuat namun ketika menjelaskan fenomena sosial menjadi sangat lemah. Pada saat memprediksi kemungkinan munculnya perilaku seseorang bisa jadi teori ini sangat bermakna sehingga survey-survey menjelang pemilihan umum menjadi sumber yang dianggap paling dipercaya untuk menjelaskan kemungkinan siapa yang akan dipilih oleh responden. Namun jika terjadi fenomena, sebagaimana ketidak-sesuaian hasil survey dalam contoh diawal maka teori ini sangat lemah dalam menjelaskan fenomena tersebut.

demikian, hal ini tidak menghambat penggunaan teori ini dalam aplikasinya terutama dalam psikologi politik, psikologi konsumen,



dan psikologi moral. Secara konseptual, teori ini masih merupakan teori yang baik dalam memprediksi perilaku seseorang dalam situasi tertentu.

Boudon mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: 1. setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb., 2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadiankejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran. Postulat keempat mendasarkan pada pernyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.²²

Berdasarkan penjelasan dan uraian para ahli, penulis memposisikan

sesuai dengan masalah yang diangkat. Teori pilhan rasional



digunakan untuk menganalisa Tindakan rasional yang dipilih DPP partai PDI Perjuangan Ketika memutuskan memilih memecat kader terpilih Novianus YL Patanduk pada pemilihan legislatif Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, begitupun dengan Tindakan rasional yang dipilih untuk memilih Risfayanti Muin sebagai pengganti kader yang terpilih. Sehingga teori yang digunakan bertujuan untuk menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan tentang pilihan rasional partai PDI perjuangan dalam melakukan suatu Tindakan dan penulis bisa memahami bagaimana karakter individu terhadap pilhan rasionalnya.

2.5 Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadi Prakarsa (2011) Dalam Tesis dengan Judul “Fungsi Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Legislatif Di Indonesia. Penelitian menyebutkan Dalam pembahasan terlihat bahwa fungsi parpol dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu yaitu mengusulkan pemberhentian antarwaktu terhadap anggota legislatifnya masing-masing. Perbedaan yang dapat terlihat bahwa pada periode 2004-2009 diatur di penggantian antarwaktu sedangkan pada periode 2009-2014 diatur terpisah dari penggantian antarwaktu dengan kata lain diatur sendiri namun masih belum

memberikan perincian tentang fungsi parpol. Dan kewenangan parpol dalam hal diberhentikannya anggota legislatif yang mana sesuai



dengan peraturan perundang-undangan parpol berwenang mengusulkan diberhentikannya anggota parpolnya yang berada di keanggotan legislatif. Bila di cermati fungsi Parpol dalam pemberhentian antarwaktu dapat dilakukan prosedur yang ideal seperti perlu dilakukannya pembenahan dalam aturan-aturan yang mengatur fungsi parpol secara lebih detail agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mentapsirkan aturan yang ada. Dan pada kewenangan parpol dalam hal diberhentikannya anggota legislatif semestinya dapat melibatkan peran masyarakat seperti melalui mengumpulkan petisi (pernyataan sikap) sebanyak 10 persen suara rakyat di daerah pemilihan anggota parlemen tersebut, yang jika petisi tersebut dapat terkumpul baru anggota parlemen tersebut dapat di pecat atau juga dapat dilakukan melalui proses impeachment di pengadilan.

2. Resa Puji Atuti. Dalam jurnal ini berjudul: Konseptualisasi Larangan Pemberian Imbalan Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menunjukkan Perbuatan pemberian imbalan pada proses pencalonan pertama kali dikenal pada saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2018, seakan perbuatan ini begitu sangat dekat terjadi dalam Pesta demokrasi kita namun begitu sangat sulit untuk

mbuktikannya. Pembuktian terhadap perbuatan ini menjadi sangat
it dikarenakan beberapa aspek baik dari asepek regulasi,



wewenang pengawasan dan penindakan. Larangan terhadap perbuatan memberikan imbalan ini juga diatur dalam Undang – Undang 7 Tahun 2017 Pasal 228 dan Pasal 242 yang secara tegas melarang perbuatan pemberian imbalan dalam proses pencalonan. Namun setelah kita mencermati ketentuan yang mengatur larangan pemberian imbalan dalam Undang – Undang 7 Tahun 2017 ternyata memiliki karakter pembuktian yang sama dengan pembuktian pada Undang – Undang Pilkada. Misalnya salah satu contohnya berkaitan dengan harus adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa penerima imbalan benar – benar menerima imbalan pada proses pencalonan, selain itu adanya penjatuhan sanksi yang menjerat bagi pemberi dan penerima sehingga menjadi kesulitan tersendiri dalam menangani perbuatan ini. Terlebih lagi ketidakjelasan mekanisme pengawasan dalam mendeteksi secara dini perbuatan pemberian imbalan pada proses pencalonan ini. Kerumitan inilah yang mengantar penulis untuk melakukan konseptualisasi terhadap cara untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perbuatan pemberian imbalan pada proses pencalonan. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, yakni menganalisis konsep – konsep yang ada untuk membentuk konsep baru.



rian Lopak, dalam jurnal ini berjudul Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif di Kabupaten Halmahera

Utata. Dalam penelitian ini menjelaskan Rekrutmen partai politik memberikan gambaran jelas bagaimana calon legislative mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan sampai pada penetapan calon anggota legislative. Namun dilematis ketika sampai pada penentuan calon tetap legislative partai politik PDI-P, karena pada titik ini terjadi pertarungan kepentingan politik individu untuk menjadi calon legislatif.

Berdasarkan penelitian di atas jika dilakukan perbandingan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. Adapun persamaan dalam lingkup kajian penulis yaitu pertama mengkaji tentang mekanisme rekrutmen partai politik mekanisme pemberhentian kader partai, dan ketiga, pemberian mahar politik terhadap partai, sedangkan perbedaan dalam kajian penulis adalah penjabaran faktor pemecatan kader terpilih pada pemilihan anggota legislatif provinsi Sulawesi Selatan, meski dalam perolehan suara di internal partai mendapatkan suara tertinggi.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap luaran yang ingin dicapai dari penelitian ini. Formulasi hubungan antara partai politik dengan calon kandidat yang maju dalam pemilihan umum dalam konteks dinamika partai politik di Indonesia semakin

untuk dikaji dan akan terus menjadi bahan penelitian yang diharapkan dapat diharapkan bisa memajukan system perpolitikan maupun



perlembagaan dalam demokrasi di Indonesia. Aturan dalam UUD partai politik itu sendiri menjadi tameng dan indikasi eksistensi suatu partai sehingga dapat menciptakan kesan superior ditengah masyarakat.

Pemahaman umum tentang partai politik adalah sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Kebijakan umum partai tersebut merupakan asil pepaduan berbagai kepentingan yang idup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan umum itu adalah lewat pemilihan umum.²³

Dalam kasus yang dikaji oleh peneliti terkait pemecatan calon legislatif terpilih DPRD Sulawesi selatan oleh DPD Partai PDIP menjadi salah satu bukti eksistensi partai poltik. Dalam hal ini partai PDIP menunjukkan kekuatan partai dalam keputusan pemecatan kandidatnya yang telah memenangkan suara terbanyak ditempat pemilihan (Dapil II wilayah Makassar B). Makna "kekuasaan" dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi anomali yang akan terus mengikis demokrasi di Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan bahwa

at dari fakta yang menunjukkan telah terjadi pemecatan calon

n Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. PRENADAMEDIA. Jakarta. Al. 277-



legislatif terpilih DPRD Sulawesi selatan oleh DPD Partai PDIP atas nama Novianus YL Patanduk setelah dinyatakan menang dengan perolehan suara terbanyak di dapil II wilayah Makassar B oleh KPU dan setelah hasil penelitian sementara peneliti menunjukkan bahwa pemecatan yang terjadi adalah konsenkuensi dari pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan internal partai.

Pelanggaran yang dimaksud terkait keterlambatan pembayaran uang saksi, tudingan permaian jumlah suara serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik dengan pengurus partai dan melakukan pergerakan diluar kendali partai. Pasca pemecatan, risfayanti naik menggantikan posisi novianus yang notabennya adalah kandidat dengan perolehan suara terbanyak kedua (setelah novianus) di Dapil II wilayah Makassar B. Yang menjadi lebih menarik adalah risfayanti merupakan salah satu kader terbaik PDIP yang juga menduduki posisi-posisi penting dalam partai PDIP yang jika dibandingkan dengan novianus secara psikologis dan historis sangat jauh berbeda. Perbedaannya adalah risfayanti adalah kader dan juga pengurus partai sedangkan novianus dianggap sebagai “kutu loncat” partai.



SKEMA PIKIR

